



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DAN KEY PERFORMANCE INDICATOR  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

**KESATU** : Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 menggunakan sasaran strategis yang menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II dan indikator kinerja lain yang relevan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai Renstra SKPD dengan target yang seharusnya terwujud pada tahun 2018; dan

b. Indikator kinerja lain yang relevan, selanjutnya disebut indikator kinerja tambahan dengan sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi, yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun indikator kinerja tambahan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang diterima pada Tahun 2017 dan 2018 sesuai Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016, dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta u.p. Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. pembaruan data realisasi pelaksanaan kegiatan APBD sesuai Instruksi Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD, dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta u.p. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
3. ketepatan penyampaian Laporan Bulanan Fungsional Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah termasuk UKPD di bawah koordinasinya sesuai dengan SAP secara tepat waktu sesuai Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah BPKD Provinsi DKI Jakarta u.p. Bidang Akuntansi;
4. penyelesaian sensus aset/barang inventaris sesuai Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah BPAD Provinsi DKI Jakarta u.p. Bidang Inventarisasi Data, Informasi dan Dokumentasi Aset; dan
5. pembaruan data strategis pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 71/SE/2017 tentang Pelaksanaan Input dan Pembaruan Data pada Portal Data Terbuka Jakarta Untuk Mendukung Capaian Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI), dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta u.p. Seksi Pelayanan Informasi Publik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) pembaruan data bagi Perangkat Daerah yang sudah mengunggah data pada portal data.jakarta.go.id; dan
  - b) mengunggah 3 (tiga) jenis data baru bagi OPD yang belum pernah mengunggah data pada portal data.jakarta.go.id. Khusus untuk Walikota/Bupati mengunggah 3 (tiga) jenis data yaitu : data kependudukan, data PMKS di luar Panti (orang terlantar) dan data RW Kumuh.

- KEDUA** : Para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 menggunakan Format I sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Key Performance Indikator Tahun 2018 menggunakan Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja tambahan yang sama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 menggunakan Format II sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Para Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan target indikator kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengampu indikator kinerja tambahan dimaksud sesuai tugas dan fungsinya.
- KELIMA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan penyusunan Key Performance Indikator (KPI) Tahun 2018.
- KEENAM** : Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Perangkat Daerah Pengampu memberikan dukungan data capaian indikator kinerja tambahan secara periodik berdasarkan bukti yang telah diverifikasi paling lambat tanggal 1 setiap bulannya.
- KETUJUH** : Para Kepala Perangkat Daerah mengikuti seluruh tahapan penyusunan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 dan penyusunan Key Performance Indicator tahun 2018 sesuai Format III sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini.
- KEDELAPAN** : Para Kepala Perangkat Daerah memperluas praktek penyusunan Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Eselon III dan IV sesuai kebijakan internal Perangkat Daerah dan menyerahkan dokumen perjanjian kerja dimaksud ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan ditembuskan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya pada minggu ke-IV (keempat) bulan Februari 2018.
- KESEMBILAN** : Dengan berlakunya Instruksi Gubernur ini, Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indicator Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2018  
Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
 (ANAK LAMPIRAN I/5-6 PERMENPAN-RB No.53 TAHUN 2014)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Penambahan Road Ratio	0,0032%
		Penambahan Luas jalur pejalan kaki	146.400 m <sup>2</sup>
		Persentase Kondisi Jalan Mantap	98,00%
		Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m')	30.000 m
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi	Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%
		Progres realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	100%
		Penyampaian Laporan Fungsional Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara tepat waktu	100%
		Persentase progres sensus aset/ barang inventaris OPD	100%
		Persentase progres updating data strategis OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan fungsi	n data set

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan	827.235.866.444	APBD
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	516.234.748.422	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	50.000.000.000	APBD



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta,  
 Anies Baswedan, Ph.D.

Jakarta,  
 Kepala OPD,

Nama Jelas  
 NIP.

Keterangan:

- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Kolom Nomor Urut        | : diisi dengan nomor urut  |
| 2 | Kolom Sasaran Strategis | : diisi dengan sasaran strategis OPD sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 2018 |
| 3 | Kolom Indikator Kinerja | : diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran (indikator kinerja tambahan) |
| 4 | Kolom Target            | : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun 2018                  |
| 5 | Kolom Program           | : diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis  |
| 6 | Kolom Anggaran          | : diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut   |
| 7 | Kolom Keterangan        | : diisi keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD)                                     |



Tahapan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indicator Perangkat Daerah  
Tahun 2018

No.	Uraian Pekerjaan	Peserta	Tempat	Waktu	Keterangan
1.	Koordinasi penentuan target Indikator kinerja tambahan	Para Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala OPD dan OPD Pengampu (Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	menyesuaikan	8-11 Januari 2018	Koord : Bappeda
2.	Pengumpulan draf final Perjanjian Kinerja dan KPI Tahun 2018	Bappeda dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala OPD	Bappeda	12-15 Januari 2018	Koord : Bappeda
3.	Penelitian draf final Perjanjian Kinerja dan KPI Tahun 2018	Badan Kepegawaian Daerah dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala OPD	Badan Kepegawaian Daerah	16-17 Januari 2018	Koord : BKD
4.	Rakor persiapan penandatanganan Perkin dan KPI Ka. OPD 2018	Bappeda, BKD, Diskominfo, Biro ORB Setda, Biro KDH-KLN Setda dan Biro Umum Setda	Badan Kepegawaian Daerah	Selasa, 16 Januari 2018	Koord : BKD
5.	Proses Pencetakan Dokumen :  1. Perjanjian Kinerja Ka. OPD Tahun 2018  2. KPI Ka. OPD Tahun 2018	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah	Kamis, 18 Januari 2018	Koord : BKD

No.	Uraian Pekerjaan	Peserta	Tempat	Waktu	Keterangan
6.	<p>Acara seremonial :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanda tangan Perkin Ka. OPD 2018</li> <li>2. Penanda tangan KPI Ka. OPD 2018</li> <li>3. Penanda tangan Komitmen Open Data 2018</li> </ol>	Gubernur dengan Para Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala OPD	Balai Agung Pemprov. DKI Jakarta	Jumat, 19 Januari 2018	Koord : BKD
7.	Penginputan target KPI Kepala OPD pada sistem eKinerja	Para Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala OPD	menyesuaikan	19-21 Januari 2018	Koord : Diskominfotik